



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MIRHAD TAWAKKAL
2. Jabatan : AUDITOR
3. NHK : 732355

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1134 m2/221 m2 di KAB / KOTA MAROS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 850.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 389.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 2BU Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, DAIHATSU F651RV-GMRFH M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. LAINNYA, PASIFIK SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. LAINNYA, POLIGON SEPEDA GUNUNG Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
5. MOTOR, BEAT BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
6. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 276.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 38.076.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 23.754.861

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.300.830.861

**III. HUTANG** Rp. 1.302.031.660

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. -1.200.799

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.